



Pegiat Seni Ramaikan JMR 2014



Sejumlah komunitas pegiat seni turut meramaikan Jagongan Media Rakyat 2014 dengan tampil di panggung Tobong, Kamis (23/10) sore – malam. Sebagai pembuka, kelompok musik Dendang Kampung atau DK memainkan beberapa nomor yang sarat kritik sosial. Penampilan DK dengan ramuan musik yang rancak menghentak area pameran kuliner yang semula sepi. Selain DK, berturut-turut Frog Music Lab dan Andra Project membawa nuansa jazz yang kental ke area JMR dengan irama yang dimainkan. Pertunjukkan musik itu ditutup oleh penampilan Ade Tanesia & Sitar Tambun yang berkolaborasi memainkan sejumlah komposisi puisi musikal.

(Sambungan dari halaman 3)

suara, namun dilupakan ketika pemilu usai, mengemukakan pendapat dengan menggambarkan kehidupan sehari-hari mereka.

Pemilihan tokoh dalam film dokumenter ini menggambarkan tiap masalah sosial yang berkaitan dengan program pemerintah. Isu yang diangkat adalah kepemilikan lahan atau tanah, rumah tinggal yang layak, pekerjaan dan kebutuhan dasar harian.

Mengapa isu etnis dan golongan tidak terwakili dalam film dokumenter ini? Mendapat pertanyaan ini, Dandhy mengaku kesulitan untuk mencari benang merah antara keempat isu di atas dengan isu etnis dan golongan karena pada dasarnya isu etnis dan golongan itu sama.

KAMPUNG HALAMAN

Menjadikan Remaja Kritis dan Aktif di Lingkungannya

Oleh: Irine Wardhanie

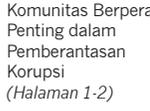
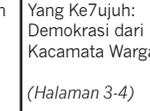
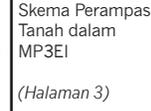
Inisiatif yang dilakukan Kampung Halaman terbukti mampu mendorong remaja menjadi lebih aktif dalam proses pengambilan kebijakan. Padahal selain dapat menjadikan remaja lebih kritis, memberikan ruang keterlibatan pada mereka juga dapat memaksimalkan potensi positif yang dimiliki.

Adalah Sekolah Remaja yang didirikan pada 2008 atas inisiatif Kampung Halaman. Metode yang digunakan dalam sekolah ini adalah belajar bersama menggunakan berbagai media seperti media gambar, tulisan dan foto. Para remaja didorong untuk mengenali lingkungannya dengan mengumpulkan data-data yang kemudian disimpulkan menjadi sebuah saran untuk para pengambil kebijakan.

Hal yang menarik dari Sekolah Remaja ini adalah munculnya temuan-temuan kritis yang didapat dari hasil pengumpulan data. Seperti

yang terjadi di Pulau Bungin, NTB misalnya. Remaja di Pulau Bungin menyimpulkan bahwa jumlah pendapatan per bulan ternyata tidak berpengaruh pada perubahan kebiasaan buruk masyarakat. Kebiasaan itu seperti membuang sampah ke laut dan minimnya kepemilikan kakus di dalam rumah.

Isu lain yang diangkat di daerah Surapandan, Cirebon, Jawa Barat mengenai dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan pasir secara tradisional oleh warga. Kegiatan ini telah dilakukan secara turun temurun. Remaja Surapandan merasa gelisah karena mereka yang rata-rata duduk di bangku sekolah menengah tidak ingin berakhir sebagai penambang pasir. Namun di sisi lain mereka tidak ingin meninggalkan desa karena merasa tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk melakukannya.

	Komunitas Berperan Penting dalam Pemberantasan Korupsi (Halaman 1-2)		Yang Ke7ujuh: Demokrasi dari Kacamata Warga (Halaman 3-4)		Skema Perampasan Tanah dalam MP3EI (Halaman 3)		Kampung Halaman (Halaman 4)		Pegiat Seni Ramaikan JMR 2014 (Halaman 3)
---	--	---	---	---	--	---	-----------------------------	---	---

Komunitas Berperan Penting dalam Pemberantasan Korupsi

Oleh: Irine Wardhanie

Komunitas memiliki peran penting dalam upaya memberantas kejahatan korupsi. Dengan bahasa lokal, komunitas bisa mengkampanyekan semangat anti korupsi di wilayahnya masing-masing.

“Hanya kekuatan komunitas yang mampu melawan kejahatan korupsi,” ucap Bambang Widjajanto, wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Seminar Nasional “Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Berbasis Komunitas” yang dilaksanakan di ruang Ajiyasa, Jogja National Museum, Kamis (23/10). Seminar ini membuka rangkaian acara Jagongan Media Rakyat 2014 yang diadakan 23 – 26 Oktober 2014.

Bambang kemudian mencontohkan keterlibatan sejumlah media komunitas dalam kampanye pemberantasan korupsi melalui media lokal dengan bahasa lokal, mulai dari lagu hingga iklan layanan masyarakat. Media komunitas dianggap penting untuk mengkampanyekan bahaya korupsi. “Bisa dibayangkan jika *jingle-jingle* bahaya korupsi ini dibuat dalam bahasa lokal, kesadaran

masyarakat mengenai korupsi akan dahsyat,” ucap Bambang.

Selama ini, kejahatan korupsi tidak sepenuhnya disadari oleh masyarakat. Korupsi semata dipahami sebagai masalah hukum yang ditangani dengan pendekatan hukum, sehingga pada tingkat tuntutan tidak memberi efek jera pada pelaku korupsi.

(Bersambung ke halaman 2)



Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto menjadi pembicara kunci dalam seminar nasional “Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Berbasis Komunitas” dalam Jagongan Media Rakyat 2014, Kamis (23/10), di Yogyakarta.

(Sambungan dari halaman 1)

la menambahkan, saat ini perhatian masyarakat terhadap kasus korupsi selesai ketika koruptur ditangkap. Padahal yang menjadi masalah adalah sistem yang mereproduksi tindakan korupsi tersebut. Jika hanya koruptor yang ditangkap namun sistem yang mereproduksi tindakan korupsi itu tidak ditangani, maka kemampuan penegak hukum dalam menangani kasus korupsi akan kalah dari sistem yang memproduksi korupsi baru.

Korupsi yang saat ini melibatkan keluarga mulai dari ayah, menantu, istri dan anak telah mengkhawatirkan. Di beberapa daerah, hal itu membentuk kekuatan dinasti. Upaya mengatasi situasi ini membutuhkan keterlibatan komunitas.

Kelemahan dalam pencegahan tindak korupsi selama ini adalah tidak diikutsertakannya komunitas atau masyarakat, sehingga semua kasus diserahkan pada pihak berwajib. Hal inilah yang kemudian disadari oleh KPK. "Komunitas adalah ujung tombak perjuangan bersama melawan tindak korupsi," tegasnya.

Salah satu pegiat media komunitas Lintas Merapi, Sukiman, menuturkan, di tingkat desa ketidaktahuan masyarakat mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan menjadi penyebab korupsi. Untuk itu, berbagai komunitas perlu bergerak guna membuka ruang informasi terkait pembangunan dan menyediakan wacana guna mengajak publik mengawasi pembangunan. "Medium yang sering digunakan untuk melaksanakan fungsi ini adalah buletin, berita radio komunitas, media internet yang mampu menyajikan informasi kegiatan pembangunan dari perencanaan hingga evaluasi," terang Sukiman.

Selain Bambang Widjojanto dan Sukiman, seminar ini juga menghadirkan Dandhy Laksono, jurnalis dan pegiat Watchdoc, serta Karim, Karim, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan BAPPENAS. (Grattiana Timur)



Foto: Anak-anak bermain dengan kursi lipat dari salah satu stan peserta pameran JMR 2014, Kamis (23/10).

Skema Perampasan Tanah dalam MP3EI

Oleh : Grattiana Timur

Combine Resource Institution menyelenggarakan diskusi Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan tema "Bukan Desain Pembangunan, tetapi Skema Perampasan Tanah Air Rakyat Indonesia". Diskusi ini fokus membahas kritik terhadap pola pembangunan Indonesia.

Dalam diskusi yang diadakan sebagai rangkaian dari Jogja Media Rakyat (JMR) 2014 di Jogja National Museum, Kamis (23/10) ini, Dian Yanuardi selaku salah satu pemateri mengungkapkan bahwa desain pembangunan dalam MP3EI berujung pada perampasan tanah air. "Ini bukan desain, tetapi skema perampasan tanah air. Praktik korporasi dijadikan desain pembangunan," ungkapnya.

ULASAN FILM

Yang Ke7ujuh: Demokrasi dari Kacamata Warga

Oleh: Irine Wardhanie

"Menjadi pejabat, menjadi presiden itu tidak selamanya, tapi menjadi rakyat itu untuk selamanya," ucap salah seorang tokoh yang berprofesi sebagai petani dalam film dokumenter *Yang Ke7ujuh*, garapan Dandhy Dwi Laksono dari rumah produksi Watchdoc. Film ini merupakan satu dari puluhan film yang diputar di acara Jagongan Media Rakyat, Kamis (23/10) di Jogja National Museum Yogyakarta.

Hal ini bisa dilihat dari geliat pembangunan di Indonesia yang terkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur berbasis industri. "Pembangunan infrastruktur selama ini bukan untuk rakyat, tetapi untuk menghubungkan pusat industri satu dengan pusat industri yang lain," tegasnya.

Proses perampasan tanah air terjadi melalui banyak mekanisme. Pertama, pulau-pulau dinamai dengan komoditas sumber daya andalan di pulau tersebut. Kedua, pembentukan dan pemangkasan regulasi untuk aliran bebas kapital, dan ketiga fragmentasi blok produksi.

Terkait dengan acara JMR yang mewadahi banyak komunitas media rakyat, Hendro Sangkoyo dari Sekolah Ekonomika Demokratik (SED) mengingatkan agar suara komunitas tidak menjadi perpanjangan tangan aktor perampas hak rakyat. "Jangan gunakan kosakata lawan dan jangan terjebak transmisi dari cerita para aktor ketika berbicara tentang pembangunan kepada rakyat," tegasnya.

Film dokumenter ini mengangkat situasi Indonesia dalam menghadapi pemilihan presiden 9 Juni 2014 lalu. Menariknya, film ini tidak menangkap momen riuh para pendukung calon presiden dari dua kubu. Film dokumenter ini justru menangkap bagaimana wong cilik yang dalam proses demokrasi selama ini hanya ditempatkan sebagai obyek untuk mendapatkan

(Bersambung ke halaman 4)